

# FUNGSI PARTAI GOLKAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MANADO TAHUN 2015<sup>1</sup>

Oleh : Jimbreif Patuwo<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. (Harahap dkk 2007).*

*Dalam pemilihan kepala daerah di Kota Manado tahun 2015, Partai Golongan Karya (GOLKAR) diharapkan mampu menempatkan kader-kader yang mempunyai kredibilitas dan tidak hanya sekedar popularitas untuk dijadikan sebagai calon yang diusung. Untuk itu peran dan fungsi partai menjadi sesuatu yang penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menggambarkan peran dan fungsi partai Golkar khususnya dalam melakukan rekrutmen calon menjelang Pilkada Langsung tahun 2015.*

**Keyword : Partai Politik dan Pilkada.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu (Harahap dkk 2007). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 adalah momentum penting untuk partai politik dalam menunjukkan eksistensinya. Bagi partai politik, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 memiliki arti yang strategis sekaligus krusial. Strategis dalam artian, apabila Pemilihan Umum Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik dalam kualitas demokrasi yang memadai, jalan menuju demokrasi akan semakin mulus. Namun, apabila Pemilihan Umum Tahun 2015 tidak menunjukkan kualitas yang memadai, demokrasi itu sedang memasuki titik krusial.

Dalam sistem demokrasi, eksistensi Partai Golkar merupakan sebuah keniscayaan. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik dengan kebutuhan masyarakat disuatu negara. Partai Golkar adalah salah satu sarana yang memiliki ragam fungsi, platform (program partai) dan dasar pemikiran. Fungsi Partai Golkar salah satu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menilai demokratis dalam suatu pemerintahan. Dalam perkembangannya, Partai Politik atau Partai Golkar dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan (policy) melalui sistem ketatanegaraan yang di berikan oleh pemerintah kepada warga negara untuk mendirikan partai politik, maka disinilah kita mengetahui tempat sesungguhnya bagaimana negara dan warga negara berinteraksi.

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Fungsi Partai Golkar berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar pada bagian ketiga pasal 9, Partai GOLKAR berfungsi:

1. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
3. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekarang ini, eksistensi Partai Golkar sedang dilanda badai politik dengan dualisme kepengurusannya. Hal ini di latar belakang oleh merapatnya kubu Agung Laksono ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan mengklaim bahwa kongres Golkar yang dilakukannya adalah sah dan juga menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar. Hal ini mendapat respon dari kepengurusan Golkar Abu Rizal Bakri yang juga melakukan Kongres Partai Golkar di Bali dan menetapkan Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum kembali dan di akui seluruh DPD Partai Golkar yang hadir dalam kongres tersebut. Ini awal mula dualisme kepengurusan Golkar.

Dalam pelaksanaan fungsi Partai Golkar ini, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Partai Golkar itu sendiri, seperti Rekrutmen Politik, Money Politik, kendala-kendala waktu pencalonan, masalah teknis administrasi, masalah interval partai, dan masalah penjarangan di Partai Golkar.

Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang akan di ikuti juga oleh seluruh warga kota Manado. Permasalahan yang dialami oleh partai Golkar tidaklah mungkin akan merubah pola pikir masyarakat terhadap calon yang diusung. Karena masyarakat melihat kualitas dan sikap kepemimpinan seorang calon yang nantinya memimpin haruslah yang bermoral dan berintelektual tinggi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Fungsi Partai GOLKAR dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Manado Tahun 2015?”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Parpol**

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik –(biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan programnya. (Budiardjo 2010:404)

Partai politik menurut Giovanni Sartori adalah politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (a party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office). (Budiardjo 2010:405)

### **Konsep Pemilihan Umum**

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dapat dilakukan dengan pemberian suara dalam Pemilihan Umum “Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sodikin 2014:5)

Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti pemilihan umum harus diselenggarakan dengan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Sodikin 2014:5)

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian Deskriptif Kualitatif. Dimana penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati (Thohirin 2013:2). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : Wakil ketua DPD Golkar, Wakil Sekertaris DPD Golkar, Tokoh Masyarakat 3 Orang.

Jenis data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : Data primer, yakni data yang diperoleh melalui pengumpulan data dari informan, baik melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi, dan Data sekunder, yakni data yang diperoleh berdasarkan dokumentasi dan arsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota Manado. Dan teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah wawancara, dan observasi.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Silalahi 2009:339)

Reduksi Data adalah proses dalam pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data-data kasar yang diperoleh melalui catatan-catatan tertulis di lapangan.

Penyajian Data yakni sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Verifikasi yaitu peninjauan kembali catatan-catatan di lapangan, sehingga data-data yang di hasilkan dapat di uji kebenarannya.

## **Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **A .Partai Golkar**

#### **Sejarah Berdirinya Partai Golkar**

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama GOLONGAN KARYA (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar

Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaanannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemegang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.

Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai

Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Pada awal tahun 2015 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil munas Bali dan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Pada awal Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang mensahkan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Pada bulan April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Pada tanggal 10 Juli 2015, empat hakim yang mengadili kasus tersebut, yaitu Arif Nurdu'a, Didik Andy Prastowo, Nurnaeni Manurung dan Diah Yulidar memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie terkait dualisme kepengurusan partai. Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTTUN Jakarta. Dengan dibacakannya putusan PTUN itu, kepengurusan Golkar yang sah saat ini adalah hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainudin Amali sebagai sekjen.

## **B. Visi dan Misi Partai Golkar**

### **- Visi**

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya. Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

### **- Misi**

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

- 1.) mempertegas, komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
- 2.) melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
- 3.) meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Parnpol Dalam Tahapan Pilkada di Kota Manado**

#### **1. Proses Penjaringan Bakal Calon**

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 58 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh portal politik atau gabungan partai politik.

Dengan demikian, partai politik telah mendapat kewenangan penuh sebagai pintu atau bahkan kendaraan bagi tiap-tiap pasangan calon yang akan maju berkompetisi dalam mererebutkan jabatan kepala daerah. Dan tidak ada pililtan lain bagi putra daerah maupun kader partai untuk tidak memakai partai sebagai persyaratan utama untuk maju sebagai calon kepala daerah. Sehingga partai politik sebagai aktor yang dipercaya dalam menyaring bakal calon dari tiap-tiap pasangan, harus mempunyai mekanisme internal partai yang selektif dalam melakukan penjaringan bakal calon.

Dalam penelitian ini, akan dilaporkan secara ringkas mekanisme partai politik dalam melakukan penjaringan bakal calon pasangan walikota dan Wakil walikota Manado yang dilakukan oleh partai politik di Manado.

Seperti halnya dengan partai Golkar, partai yang mengusung pasangan Jimmi Rimba Rogi-Bobi Daud itu juga melakukan mekanisme internal partai dalam proses penjaringan bakal calon.

“Dalam proses penjaringan yang dilakukan partai Golkar bersifat terbuka. Dalam arti, partai membuka peluang dan kesempatan bagi siapa saja para putra daerah Kota Manado yang ingin maju sebagai calon kepala daerah melalui pintu partai Golkar”.

Hal ini dikarenakan partai Golkar berkeinginan memberikan pilihan bagi masyarakat Kota Manado atas calon pemimpin yang terbaik bagi kemajuan Kota Manado dengan memberikan kesempatan yang luas atau terbuka bagi semua putra daerah. Karena sebelum diadakannya pilkada langsung, mekanisme seperti itu (penjaringan) masih ditentukan atau “rekomendasi ketat” dari pusat. Dan perwakilan di daerah (DPD Partai Golkar Kota Manado) hanya melaksanakan ketentuan pusat tersebut. Jadi dengan sistem dan kondisi yang baru tersebut, partai Golkar juga berusaha untuk menyesuaikan mekanisme internal partainya, dalam melakukan perannya dalam membangun demokratisasi, khususnya dalam Pilkada di Kota Manado.

Dalam pemilihan kepala daerah tersebut, dalam proses pengambilan formulir yang disediakan Partai Golkar Kota Manado telah menarik minat dari tiga pasangan bakal calon. Namun dari ketiga formulir yang terambil tersebut, hanya satu formulir yang dikembalikan kepada pengurus partai Golkar, yang berarti hanya satu pasangan calon yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah melalui partai Golkar, yaitu pasangan Jimmi Rimba Rogi-Bobi Daud.

Meskipun hanya satu pasangan yang mendaftar sebagai bakal calon (Calon tunggal), partai Golkar tetap mengadakan suatu mekanisme penjurangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan internal partai. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa mekanisme tersebut memang sudah merupakan prosedur partai yang ada dan demi menghasilkan suatu kemantapan atau keputusan bersama atas pasangan calon yang akan diusung dalam proses Pilkada, maka proses penjurangan (penilaian) pasangan calon tetap dilakukan. Partai Golkar.

Pada prinsipnya, proses penjurangan yang dilakukan partai Golkar Kota Manado terdiri dari tiga tahap, yaitu:

**1) Tahap persiapan :**

*Pertama*, diadakan rapat pleno yang diperluas dari para pengurus Golkar Kota Manado, apakah DPD Golkar Kota Manado akan mengajukan calon Walikota dari Wakil walikota dalam Pilkada Kota Manado 2015, kesepakatan dalam pengajuan calon tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu: perolehan suara dalam pemilu legislatif Kota Manado 2015, perolehan kursi di DPRD Kota Manado, kemungkinan ketersediaan sumber daya manusia sebagai bakal cakadar, serta pertimbangan yang lainnya.

*Kedua*, diadakan rapat pleno yang diperluas oleh DPD Golkar Kota Manado, dengan partai atau fraksi manakah DPD Golkar akan menetapkan kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama atau berkoalisi sebagai langkah strategis dalam memenangkan Pilkada Kota Manado.

Dalam melakukan koalisi antar partai, DPD melakukan berbagai pertimbangan seperti: perolehan suara partai atau fraksi yang akan berkoalisi dalam pemilu legislatif 2015, perolehan kursi di DPRD Kota Manado pada hasil pemilu 2015, ketersediaan sumber daya manusia sebagai bakal cakada partai atau fraksi untuk dipersandingkan dan dipertandingkan dalam Pilkada Kota Manado 2015.

Setelah berbagai pembahasan dan musyawarah dilakukan, DPD Golkar Kota Manado akhirnya memutuskan bahwa dalam Pilkada Kota Manado 2015 tersebut GOLKAR melakukan kerja sama atau koalisi dengan partai lain dalam mengusung calon walikota dan wakil walikota Manado. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengamatan para pengurus partai yang terlibat dalam pembahasan kemungkinan terjadinya koalisi dengan partai atau fraksi lain, *Ketiga*, setelah rapat pleno DPD Golkar Kota Manado menetapkan untuk maju dalam Pilkada Kota Manado 2015 Golkar berkoalisi dengan partai PKS dan Gerindra.

**2) Tahap Rekrutmen**

Proses rekrutmen yang dilakukan DPD Golkar Kota Manado dalam melakukan penyaringan para Calon terbaik yang akan dicalonkan sebagai Calon dari Golkar Kota Manado, dilakukan dengan langkah kegiatan sebagai berikut:

*Pertama*, DPD Golkar Kota Manado mengumumkan adanya pembukaan pendaftaran bagi para putra putri terbaik daerah, yang berkeinginan untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah Kota Manado melalui pintu Golkar Kota Manado. Berdasarkan keterangan dari sekretariat DPD Golkar Kota Manado.

*Kedua*, setelah waktu pendaftaran yang disediakan ditutup, Mantap DPD Golkar Kota Manado melakukan penerimaan formulir pendaftaran dari masing-masing pasangan bakal calon dan melakukan verifikasi berkas-berkas yang disyaratkan, yaitu meliputi: kelengkapan administrasi dan surat dukungan dari DPD Partai Golkar Kota Manado.

**3) Tahap Penetapan pasangan calon**

Dalam tahap penetapan pasangan calon Kepala Daerah dari Partai Golkar Kota Manado, dilakukan beberapa proses penilaian yang meliputi: seleksi internal, uji publik, penyampaian

bakal calon kepada DPD Golkar dan penyampaian Calon kepada KPU Kota Manado sebagai Calon Kepala Daerah. Dalam Pilkada Kota Manado 2015, Golkar telah berhasil menetapkan pasangan calon Jimmi Rimba Rogi-Bobi Daud, sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Golkar karena berdasarkan penjelasan sekretariat DPD Golkar Kota Manado pasangan tersebut, merupakan pasangan yang memiliki visi, misi dan program sebagai calon pemimpin Kota Manado yang lebih jelas, relevan dan yang jelas sesuai dengan platform Kota Manado.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen di Partai Golkar sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku didalam partai, dimana hal-hal yang menjadi penentu seseorang pantas untuk direkrut adalah berdasarkan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela (PDLT). Selain itu pula ada pembekalan-pembekalan sebelumnya yang dilakukan partai, Dalam Rekrutmen partai Golkar Popularitas juga merupakan hal yang sangat mendukung, dapat diterima, akseptabel, kapabel. Pola rekrutmen bersifat selektif. Selain itu pula Performance calon, integritas atau pemberian diri, identitas jelas sehingga dalam perekrutan tidak ada kendala, karena perekrutan partai bersifat selektif.

## **B. Money Politik**

Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau menyuap seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang ialah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Secara umum money politic biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politic sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa money politik yang sering terjadi merupakan suatu hal yang bersifat turun-temurun dan sudah membudaya dikalangan elit politik untuk mendapatkan kedudukan, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, namun hal demikian merupakan hal yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok politik tanpa disadari bahwa hal ini tidak mendidik masyarakat dalam menentukan sikap, Money politik juga merupakan hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan keberadaanya tidak pantas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- 1.) Rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai Golkar sudah terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. serta berdasarkan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela (PDLT) dan dilakukan secara selektif. Meskipun begitu hasil rekrutmen tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan rakyat, karena masyarakat bersifat relatif, dan untuk mendapatkan kader yang berkualitas harus melalui jenjang pendidikan bukan ditentukan oleh uang.
- 2.) Money politik ini seakan menjadi salah satu syarat wajib yang harus dilakukan oleh setiap para calon pejabat, sehingga menjadi budaya jika ingin menjadi pejabat dan ingin terpilih dengan memiliki suara terbanyak harus mengeluarkan modal yang sangat banyak, hal ini seringkali menjadikan uang adalah nomor satu dibandingkan

kemampuan dan kompetensi yang harus dimiliki setiap pemimpin yang ideal, dengan adanya praktek seperti ini seringkali hanya orang-orang yang bermodal besarlah yang bisa menjadi pemenang padahal dia tidak berkompeten sama sekali, sebaliknya jika ada seseorang yang memiliki kemampuan tetapi karena dia tidak memiliki modal yang banyak dia tidak terpilih sama sekali.

### **Saran**

- 1.) Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar sudah berjalan dengan baik tapi kiranya Partai Golkar dalam merekrutmen kader-kader lebih selektif lagi serta memprioritaskan figure yang berintelektual tinggi, kapabel dan proaktif dengan rakyat. Dan tidak mengutamakan kepentingan partai politik semata.
- 2.) Kiranya money politik tidak menjadi penentu kemenangan dari suatu partai politik. Tetapi lebih mengutamakan persaingan yang sehat. Agar terciptanya pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh rakyat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amal.1988.*Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*.Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya.
- Ball Alan R.1983.*Modern Politics and Government*.MacMillan Publishers Ltd.
- Basri.2012.*Pengantar Ilmu Politik*.Jogjakarta : Indie Book Corner
- Budiardjo Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo Miriam.2010.*Dasar Dasar Ilmu Politik*.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Faturohman Deden dan Sobari Wawan.2004.*Pengantar Ilmu politik*.Malang : PT Universitas Muhamadiyah Malang
- Firmanzah. 2007. *Marketing politik :antara pemahaman dan realitas*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Harahap E.St,dkk.2007.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Bandung:BalaiPustaka
- Haryanto.1984.*Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*.Liberty.Yogyakarta
- Katz Richard dan Crotty William.2014.*Hanbook Partai Politik*.Bandung : Nusa Media
- Kencana Inu.2002.*Sistem Politik Indonesia*.Bandung : PT Refika Aditama
- Pamungkas Sigit.2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarisme.
- PJ Bouman.*Sosiologi Pengertian dan Masalah*.Terj Sugito dan Sujitno.Jakarta : Yayasan Pendidikan Masyarakat
- Rahman H.I.A.2007.*SIstem Politik Indonesia*.Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ramlan.1992.*Memahami Ilmu Politik*.Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia
- Silalahi, Uber .2009. *Metode Penelitian Sosial*.Bandung : Refika Aditama
- Sodikin.2014.*HUKUMPEMILU:PemiluSebagaiPraktekKetatanegaraan*.Bekasi:Gramata Publishing
- Sukarna.1981.*Sistem politik*.penerbit Alumni Bandung
- Tohirin.2013.*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tricahyo Ibnu.2009.*Reformasi Pemilu*.Malang:In-Trans Publishing
- Wirjono P.1981.*Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*.Jakarta: PT Eresco

### **SUMBER LAIN**

Undang Undang RI no 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

